

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, banyak faktor atau elemen yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan menjadikannya sebuah sistem. Elemen yang saling berkaitan itu kemudian dikenal dengan istilah sistem ketatanegaraan. Salah satu faktor atau elemen penting tersebut adalah pertahanan dan keamanan negara. Peranan pertahanan dan keamanan negara sangatlah vital dan mendasar, dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, menjaga keutuhan wilayah negara dari usaha-usaha yang akan merusaknya.

Fungsi dan peran pertahanan dan keamanan negara yang telah disebut, dalam negara kesatuan republik Indonesia dilembagakan dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau dulu bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Keberadaan lembaga pertahanan dan keamanan negara tersebut diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1982 Juncto UU No: 1/1998 Pasal 29 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terdiri atas: TNI Angkatan Darat beserta cadangannya, Angkatan Laut beserta cadangannya, TNI Angkatan Udara beserta cadangannya dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada saat sekarang TNI dengan Polri telah dipisahkan berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 1997.

Semua Angkatan Tentara Nasional Indonesia tersebut mempunyai wilayah tentorial sendiri dan bertanggung jawab atas keamanan sesuai dengan

wilayah teritorialnya, sedangkan untuk Kepolisian bertanggung jawab atas tindakan-tindakan kriminal yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, TNI tidak bertanggung jawab sepenuhnya di bidang keamanan yang telah menjadi tanggungjawab Kepolisian Republik Indonesia (Kompas, 20 April 2000).

Peranan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam sejarah kehidupan bernegara, baik sebelum kemerdekaan 17 Agustus 1945 maupun sesudah kemerdekaan hingga saat ini, sudah banyak yang telah dilalui dan meninggalkan sejarah tersendiri dalam dinamika kehidupan rakyat Indonesia, baik yang bercitra positif maupun yang negatif. Hal tersebut tidak dapat dihindari karena negara Indonesia masih dalam tahap proses menuju negara demokrasi yang ideal, yang berasaskan pada Pancasila dan UUD 1945.

Dalam masa Orde Baru dalam kurun waktu 32 tahun atau yang lebih populer pada saat ini dengan Orde Soeharto, citra positif TNI terlihat dengan stabilitas keamanan yang relatif tinggi sehingga menciptakan suasana yang tenang dan damai dalam kehidupan masyarakat dan menimbulkan iklim berusaha yang tenang bagi rakyat Indonesia dan bagi pemerintahnya sendiri dapat melanjutkan pembangunan yang merupakan amanat UUD 45 dan GBHN. Namun demikian, keterlibatan TNI dalam birokrasi pemerintahan sangat dominan, dari tingkat aparatur pusat sampai pada tingkat aparatur daerah, sehingga menciptakan iklim sosial yang tidak harmonis, antara masyarakat sipil dengan anggota TNI. Ada kesan bahwa masyarakat sipil adalah masyarakat kelas dua, dan anggota TNI adalah masyarakat kelas satu yang harus selalu mendapatkan prioritas dalam hal

pelayanan terhadap publik oleh aparaturnya dan hal tersebut menimbulkan kesenjangan di tengah masyarakat.

Dengan model pemerintahan otoriter dan militer pada masa Orde Baru di bawah komando Presiden Soeharto selama 32 tahun mematikan simbol-simbol demokrasi yang diamanatkan oleh konstitusi, seperti pelarangan terhadap organisasi-organisasi politik untuk hidup di negara Indonesia. Hak untuk mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tertulis adalah sesuatu yang sangat sulit diwujudkan bahkan mustahil. Oleh karena itu hanya tiga partai peserta pemilu yang dibolehkan untuk meramaikan PEMILU tiap lima tahun sekali dan pengekan terhadap kebebasan pers, yang membuat masyarakat tidak mendapatkan haknya untuk mengetahui kebenaran.

Reformasi adalah sebuah keharusan untuk memperbaiki kelemahan dan kesalahan dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi harus dilaksanakan secara konstitusional, konseptual, dan terkendali. Sikap dan pandangan politik ABRI seperti itu secara resmi telah disampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia dalam sidang umum MPR pada bulan Maret 1998 yang lalu (Kompas, 9 Maret 1999).

Bagi TNI keharusan melaksanakan reformasi lebih didasari pada realitas pada tuntutan obyektif terhadap tantangan dan perubahan masa depan. Itulah sebabnya reformasi yang dilaksanakan di tubuh TNI berdimensi internal dan eksternal. Reformasi internal di tubuh TNI akhir-akhir ini telah menghasilkan perubahan besar dan mendasar, didasari oleh kesadaran perlunya melaksanakan perubahan paradigma terhadap peran TNI selama ini.

Jika dicermati paradigma baru peran sosial politik TNI, esensinya adalah peran sosial politik TNI akan surut seiring makin berdayanya masyarakat madani. Pada akhirnya TNI meninggalkan kegiatan politik praktis, di mana hal tersebut menjadi harapan bersama masyarakat Indonesia (Kompas, 9 Maret 1999). Oleh karena itu, sikap saling memahami dan saling mengerti posisi dan peran masing-masing dari TNI dalam negara Republik Indonesia merupakan indikasi positif untuk terciptanya negara demokratis.

Walaupun sudah memasuki era reformasi TNI masih mempunyai ambisi untuk tetap mempertahankan kedudukannya dalam lembaga parlemen, yaitu MPR/DPR, dengan alasan untuk menjaga Pancasila dan UUD 45. Oleh karena itu meminimalisasi peran TNI dalam lembaga parlemen maupun dalam struktur birokrasi pemerintah adalah tuntutan yang wajar dan relevan untuk dicatat dan terus untuk tetap diperjuangkan oleh rakyat.

Reformasi merupakan momentum awal untuk perubahan, tantangan serta tuntutan akan berbagai hal menjadi wacana yang harus segera diselesaikan. Peran pemerintah sebagai elit politik semakin menunjukkan adanya representasi kekuatan rakyat yang ada di partai (Kompas, 9 Maret 1999). Rakyat berusaha untuk mengubah segala peninggalan-peninggalan di jaman Orde Baru dengan tujuan agar Negara Indonesia menuju ke arah yang lebih baik. Salah satu hal yang perlu diubah adalah peranan TNI dalam pemerintahan.

Momentum reformasi saat ini menyadarkan masyarakat akan arti penting perubahan sosial yang mengarah pada demokrasi kehidupan sosial. Begitu juga dengan perubahan tatanan politik pada tingkat makro. Berbagai perubahan di

tubuh TNI menjadi sorotan penting, seperti keterlibatannya dalam pemerintahan di mana TNI banyak menempati posisi penting dalam struktur birokrasi pemerintah sehingga menimbulkan kesan birokrasi yang militeristik yang digunakan untuk menekan lawan-lawan politik pemerintah pada saat itu agar mereka mau melakukan konformitas. Karena hal tersebut sudah berlangsung bertahun-tahun, maka tidak heran kalau perilaku sosial masyarakat terbawa ke arah budaya militer (Eko, 2000).

Akan tetapi seringkali individu tidak mampu menghadapi perubahan-perubahan tersebut dan tidak tahu bagaimana menghadapi perubahan-perubahan itu yang kadangkala dapat menimbulkan masalah, padahal dalam perubahan-perubahan tersebut individu dituntut untuk menyikapi serta menyesuaikan dengan kondisi baru dalam dirinya. Pengaruh perubahan keadaan sosial politik di negara Indonesia saat ini memaksa perubahan peran TNI yang sangat besar dampaknya pada pribadi-pribadi dari anggota TNI itu sendiri. Pengaruh yang ditimbulkan atas perubahan tersebut bisa langsung dan bisa juga tidak langsung. Ide-ide ataupun fenomena kehidupan dapat mempengaruhi pola pikir, sikap dan perilaku seseorang. Berbagai kemajuan dan perubahan memaksa seseorang untuk mengubah perasaan, pikiran dan tindakannya agar selaras dengan kondisi yang dihadapinya.

Dalam perjalanan hidupnya, manusia selalu mengadakan evaluasi atau penilaian terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupannya, seperti halnya bagaimana posisi dirinya di antara individu lainnya dan lingkungannya apakah lebih tinggi, lebih rendah, lebih baik, atau lebih buruk.

Rasa nilai diri tersebut berasal dari seluruh pikiran, perasaan, sensasi dan pengalaman yang terakumulasi sepanjang hidup (Clemes, 1995). Lebih lanjut Clemes (1995), mengemukakan bahwa rasa nilai diri itulah yang disebut dengan harga diri.

Salah satu aspek kepribadian yang penting dan harus dimiliki individu adalah harga diri, karena harga diri dapat menentukan cara seseorang untuk beradaptasi terhadap tuntutan lingkungannya. Tinggi rendahnya harga diri individu sangat menentukan sikap, perilaku dan aspek-aspek lain pada diri seseorang. Individu yang mempunyai harga diri rendah selalu diliputi oleh kekhawatiran terhadap interaksi sosial, tidak yakin akan keberhasilannya, cenderung terisolir, tidak mampu mengekspresikan diri dan menghindarkan diri dari persahabatan (Coopersmith, 1967). Akibatnya individu mengalami hambatan dalam perkembangan baik emosi maupun sosial. Di lain pihak seseorang yang memiliki harga diri rendah akan tidak menyukai dirinya, menganggap dirinya tidak mampu dalam menghadapi lingkungan secara efektif (Fitch dalam Carolina, 2000).

Penelitian Aziez (1994) menyimpulkan bahwa harga diri akan mengarah pada perilaku seseorang; positif bila harga dirinya tinggi dan negatif bila harga dirinya rendah. Clemes, (1995) mengemukakan bahwa individu yang mempunyai harga diri tinggi dapat bertindak mandiri, mampu membuat pilihan dan mengambil keputusan terhadap masalahnya, bertanggung jawab, dapat mentolerir rasa frustrasi dengan baik. Seseorang yang mempunyai harga diri tinggi akan

menyukai dirinya serta akan melihat dirinya sendiri cukup mampu menghadapi dunia yang sedang dihadapinya (Cohen dalam Atamimi, 1988).

Menurut Coopersmith (1967), harga diri menjadi persyaratan yang penting dalam membentuk tingkah laku yang efektif. Individu yang mempunyai harga diri tinggi mempunyai ciri-ciri sebagai individu yang aktif, ekspresif, cenderung sukses dalam bidang akademis dan kehidupan sosialnya, aktif dalam suatu diskusi dan mau menerima kritik dan perbedaan pendapat, mempunyai perhatian cukup terhadap lingkungan, percaya diri, optimis dan mempunyai tingkat kecemasan yang relatif rendah. Karakteristik tersebut diperlukan oleh individu untuk menyikapi perubahan peran yang dihadapi dirinya.

Bagaimanakah harga diri mempengaruhi sikap terhadap perubahan peran anggota TNI, apakah harga diri berhubungan dengan sikap terhadap perubahan peran yang dimiliki anggotanya? Adakah pengaruh harga diri pada sikap terhadap perubahan peran anggota TNI?

Untuk menjawab pertanyaan di atas dibutuhkan adanya suatu penelitian untuk mengungkap ada tidaknya pengaruh harga diri pada sikap terhadap perubahan peran.

## **B. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara harga diri anggota TNI dengan sikap terhadap perubahan peran TNI.

### C. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini meliputi:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan teori di bidang psikologi sosial. Sebagai pertimbangan dan menambah wawasan baru bahwa harga diri dapat mempengaruhi sikap terhadap perubahan peran.
2. Secara praktis, bagi anggota TNI subjek penelitian, hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi dan memberi masukan bagi anggota TNI tentang pengaruh harga diri terhadap perubahan peran.

### D. KEASLIAN PENELITIAN

Berbagai penelitian dengan menggunakan harga diri sebagai variabel bebas sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Variabel tergantung yang dijadikan prediktor harga diri adalah tingkat konformitas remaja terhadap kelompok sebaya (Aziez, 1994; Handayani, 2000), pusat kendali sebagai prediktor kepercayaan diri anak (Mukhlis, 2000), kebermaknaan hidup (Zainurrofiqoh, 2000), perilaku kepemimpinan dalam kelompok sebaya (Aryanti, 1997) kebutuhan akan privasi (Widodo, 1998), kecemasan dan prestasi kerja karyawan (Liswati, 1995), berpikir positif, (Lies, 1994; Chaerani, 1995), intensi prososial mahasiswa (Saraswati, 2000), dukungan sosial optimisme mahasiswa baru (Kurniawati, 2000), minat masuk SMK (Sulastri, 1992), partisipasi dalam gerakan sosial mahasiswa (Henik, 2000), pelatihan pengambilan keputusan (Hardjono, 1998), tingkat stress karyawan (Wulandari, 2000), agresivitas



(Danisworo, 1995), urutan kelahiran (Lestari, 1996), sikap terhadap hak-hak konsumen (Dwiatmoko, 1996), motivasi berprestasi dan prestasi belajar (Hastuti, 1993; Prihastuti, 1994; Widyastuti, 1994; Carolina, 2000; Eryunanti, 2000), kecemasan pada wanita yang peran ganda (Nuda, 1996), pola asuh demokratis (Edwina, 1994), remaja yang melakukan tindakan kejahatan dan tidak melakukan tindakan kejahatan (Hartono, 1992), minat membeli pakaian bermerek (Vitriani, 1995), perilaku sex remaja dalam berpacaran (Mayasari, 2000). Se jauh yang diketahui, tidak ditemukan penelitian yang mengungkap harga diri dengan sikap terhadap perubahan peran TNI. Dengan demikian judul penelitian ini dapat dikatakan orisinal sepanjang diketahui peneliti.

